

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu era perubahan sosial yang cepat membawa akibat krisis nilai, krisis keteladanan dan krisis kepemimpinan pada bangsa Indonesia. Sehingga mengakibatkan banyaknya tidak konsisten partai politik yang terjebak dalam jerat kepentingan sesaat. Maraknya kasus korupsi dikalangan kader dan fungsionaris partai politik yang memangku jabatan politik salah satu penyebabnya kurangnya melek politik (*political literacy*) diantara kader dan fungsionaris tersebut. Pemikiran kita tentang pendidikan yang berkaitan erat dengan sifat konflik dalam filsafat politik jelas terkait dengan krisis ideologi neoliberal. (Szkudlarek et al., 2013). Lebih lanjut Nugroho (1983, hlm. 199) mengatakan bahwa ideologi sebagai gagasan sentral sesuatu kelompok atau bangsa mempunyai peranan menentukan untuk mencegah desintegrasi sosial atau anarki nasional yang merupakan tendensi umum di kalangan-kalangan negara-negara berkembang. Surbakti (1992, hlm. 116) mengatakan bahwa fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila harus menjadi landasan bagi jalannya pendidikan politik di Indonesia. Sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan partisipasi politik dari elite politik terhadap sistem politik yang berlaku ideal menurut Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di lain pihak partai politik sebagai infrastruktur politik belum melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama pendidikan politik terhadap kadernya. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai yang telah berhasil menjadi wakil rakyat atau berhasil menduduki kursi-kursi yang ada dipemerintahan menjadi bukti riil bahwa anggota partai memiliki moral yang rendah. Sistem pengkaderan dipartai politik pun tidak berkualitas. Akibat belum optimalnya pendidikan politik yang memadai di

masing-masing partai politik. Dampaknya, pelaksanaan sistem politik tidak berjalan optimal sebab dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Sebenarnya hal yang mendasar yang menyebabkan hal itu adalah tidak terlaksananya secara maksimal pendidikan politik di internal partai. Sehingga para anggota partai tidak menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sunatra (2016, hlm. 13) bahwa pada dasarnya pendidikan politik itu adalah pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik.

Pendidikan politik terhadap kader partai harusnya adalah pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai politik yang terkandung dalam sistem politik Pancasila. Lebih lanjut Affandi (2011, hlm 10) mengemukakan bahwa

Pada forum pendidikan politik kader bangsa, peserta dibekali pengetahuan serta mampu ditempa mentalnya agar siap menjadi kader bangsa. Pengetahuan politik yang diberikan sebagai salah satu materi pendidikan merupakan faktor penting, karena didalamnya terdapat butir-butir pemikiran dan pengetahuan yang sangat berharga dalam rangka memahami kehidupan politik bangsa.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting bagi bangsa yang terbebas dari penjajahan, demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Suharti (2014, hlm 71) mengemukakan bahwa pendidikan politik dalam arti memberi penyadaran dan pemberdayaan agar masyarakat mampu memahami perannya sebagai warga negara, mampu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan diri dan tetap kelompoknya. Warga negara yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga bisa secara otonom ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik, dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan publik. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka lahirlah partai politik yang menjadi wadah bagi masyarakat dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Pendidikan politik yang dilakukan untuk menyiapkan kader berkualitas yakni kader partai politik yang memiliki integritas, tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi kepada partai politiknya dan kepada negara Indonesia. Kartono (2009: 64) Pendidikan politik yakni upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Luar pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis.

Pendidikan politik dapat terlaksana jika proses rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik, rekrutmen politik merupakan seleksi yang dilakukan oleh partai politik kepada seseorang untuk menjalankan tugas dalam sistem politik. Surbakti (2010: 150-151) rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Kemudian Rush & Althoff (1997: 245-246) menyatakan model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan, agensi, kriteria, kontrol dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai badan seperti agensi perekrutan politik, lembaga yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi lingkungan sekitarnya.

Wuryan dan Syaifullah (2013: 72) tujuan dari Pendidikan politik yakni meliputi: (1) Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan melalui keteladanan. (2) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan konstitusi yang dilandasi dengan penuh kesadaran. (3) Memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional. (4) Memiliki visi atau pandangan ke depan serta tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan maju yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa. (5) Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis secara sadar. (6) Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (7) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa. (8) Sadar akan pemeliharaan lingkungan hidup dan alam

secara selaras, serasi dan seimbang. (9) Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari harapan masyarakat.

Partai politik dan para legislator yang memiliki wewenang untuk merancang skema pendidikan yang berorientasi pada penumbuhan karakter dan nilai-nilai para kadernya. Partai politik bertanggung jawab terhadap tiga aspek kehidupan berpolitik yang sehat yakni memberikan wawasan yang memadai tentang pentingnya memperkuat kepribadian para kader dengan keterampilan mengelola emosi secara cerdas dan bertanggung jawab. KBBI (dalam Rohmah, Hermawan dan Indriyani, 2019, hlm. 5) menyatakan tanggung jawab yakni sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Artinya setiap kader memiliki ikatan kuat dengan partai politiknya, ikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab kader terhadap partai politiknya.

Hematnya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas minimnya dunia pendidikan politik terhadap kadernya dalam menyentuh nilai kearifan politik. Disinilah urgensi pendidikan politik bagi para kader partai agar melek politik (*political literacy*). Dengan demikian mendorong pelaksanaan pendidikan politik agar anggota-partai politik yang duduk di lembaga legislatif memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Lebih tegas lagi Budiarjo (dalam Sitepu 2012: 164) mengatakan “individual sebagai kekuatan politik merujuk aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik”. Oleh sebab itu, para kader politik perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih memadai, konstruktif dan sistematis yang dibutuhkan dalam membentuk kompetensi para kader politik. Dengan adanya pendidikan politik melalui kegiatan peran partai bertujuan agar kader partai mengerti mengenai sistem politik.

Melalui pendidikan politik dibangun kesadaran berbangsa dan bernegara, yang tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Etika politik menjadi salah satu point penting dalam tingkah laku para kader partai. Kader dan etika merupakan suatu *packaging* yang tidak bisa dilepaskan dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Partai dianggap sebagai wadah atau tempat terjadinya pendidikan politik terhadap kader. Pendidikan politik yang diberikan

mengacu pada etika politik bagi para kader, maka hasil dari pendidikan politik yang diberikan partai kepada kader membuat kader memiliki tugas untuk mengantarkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Affandi (1996:27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik.

Permasalahan Pendidikan politik bagi kader menunjukkan bahwa pendidikan politik hanya dilakukan oleh partai politik secara prasyarat untuk bisa meloloskan calon anggota legislatif atau eksekutif yang mempunyai elektabilitas tinggi. Proses Pendidikan politik cenderung instan, sehingga pada kader tidak dapat memahami visi dan misi perjuangan partai politik. Partai-partai yang mengambil dan mencalonkan kader partai yang populis menunjukkan bahwa Pendidikan politik bagi para kader sangat minim, sehingga partai politik tersebut merupakan jenis partai yang tidak memperdulikan keberlanjutan organisasi.

Beranjak dari pemahaman tersebut maka sebuah partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik kepada kader sehingga sebuah partai politik memiliki kader yang beretika dan bermoral yang baik, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dengan adanya kader partai dari berbagai golongan yang tidak memiliki dasar berpolitik dan etika politik yang kuat membuat partai harus melakukan pendidikan politik bagi kadernya agar tidak terjadi penyimpangan dalam berpolitik dan sasaran yang dituju yakni sebagai wadah aspirasi masyarakat dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pendidikan politik dan kaderisasi politik yang baik maka akan menghasilkan wakil rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pendidikan politik dari partai politik memiliki ciri khas yang berbeda, seperti halnya dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki tahapan dalam memberikan materi pendidikan politik bagi kader partai.

Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan partai politik merupakan sebuah kewajiban karena salah satu ciri berjalannya fungsi partai politik sebagai media pendidikan politik. Berfungsinya partai politik merupakan tahap lanjutan bahkan tingkat akhir dari proses pendidikan politik di persekolahan. Partai politik dapat dijadikan tempat setiap warga negara untuk mengaplikasikan ilmu politik yang diperoleh sebagai perwujudan partisipasi politik.

Gap nya adalah pendidikan politik yang mampu memberikan pemahaman, keterampilan untuk para kadernya untuk secara efektif bisa menyesuaikan zaman di era globalisasi ini, seperti mengelola akun media social. Dan hal – hal lain untuk bisa mengikuti perkembangan di era digital dengan tetap membentuk karakter yang kuat dalam bersikap politik. Jadi bukan hanya menjadi pejabat public yang baik, tetapi menjadi pejabat public yang baik dan mampu menjawab tantangan zaman.

Peneliti memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai yang besar, apalagi figur Megawati Soekarno Putri masih dianggap figur yang kuat untuk PDIP memperoleh dukungan publik.

Kedua: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik pemenang pemilu 2014 dan 2019

Ketiga: Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Keempat: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang di kenal dengan sebuah partai yang eksklusif dalam kaderisasi kepemimpinan baik itu tingkat legislatif maupun tingkat eksekutif, dikarenakan masih adanya peranan yang amat sangat besar dari ketua umum Megawati Soekarno Putri dalam menentukan calon kandidat kepemimpinan baik itu dilegislatif maupun eksekutif.

Kelima: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dianggap Partai yang stabil dan konsisten menjalankan program partai serta kegiatan kemasyarakatan.

Penelitian Tarsidi (2018, hlm. 55) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI-P Kab. Bandung merupakan salah satu implementasi fungsi partai politik yang diamanatkan oleh UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pembuatan kurikulum pendidikan politik di DPC PDI-P merupakan penjabaran dari kurikulum pendidikan politik yang dirancang oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI-P, yang kurikulum pendidikan politiknya khusus bagi kader PDI-P saja. Sedangkan pendidikan politik yang diberikan oleh partai kepada masyarakat kurang berfungsi dengan baik, karena tidak terstruktur kurikulum pendidikan politik bagi masyarakat atau non kader. Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi kader tingkat DPC tidak dapat dirasakan oleh semua kader, karena hanya hanya pimpinan DPC saja yang mendapatkan pendidikan politik yang terstruktur. Maka untuk mensiasati permasalahan tersebut, DPC PDI-P Kab. Bandung memberikan pendidikan politik bagi kader yang tidak mendapatkan pendidikan politik secara terstruktur melalui mengobrol bersama dengan kader yang bersangkutan sambil minum kopi atau sebagainya disertai tentang pembahasan mengenai politik.

Penelitian Rohmah, Hermawan dan Indriyani (2019, hlm. 10) menunjukkan Partai Gerindra melakukan pendidikan politik kepada kadernya melalui pelatihan dan pementapan pemahaman adapun pusat tanpa mengurangi proses musyawarah mufakat dalam internal partai Gerindra. Sistem kepemimpinan partai Gerindra berhasil membangun ketokohan di partai Gerindra kemudian partai Gerindra saat ini fokus menyiapkan kaderkader yang nantinya siap mengemban estapet kepemimpinan nasional yang saat ini masih di pegang oleh seorang Purnawirawan Letnan Jendral Prabowo Subianto, hal ini dilakukan melalui proses kaderisasi. Sistem kaderisasi di partai Gerindra dilakukan berdasarkan strata kader partai Gerindra yang tertuang dalam pasal 15 ayat 3 yakni kader penggerak, kader pratama, kader madya, kader utama dan kader manggala.

Penelitian Rosyid (2019, hlm. 37-38) menunjukkan dalam menghadapi pemilu serentak 2019, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur melaksanakan program pendidikan politik di Kabupaten Mojokerto dan Kota

Mojokerto sebagai upaya untuk penguatan ideologi dan konsolidasi partai. Orientasi pendidikan politik ini masih berorientasi pada penguatan kelembagaan internal partai, yaitu pendidikan politik yang disampaikan pada kalangan internal seperti simpatisan, relawan, kader, dan anggota partai Gerindra sendiri.

Materi yang disampaikan pada kegiatan pendidikan politik tersebut, lebih mengarah pada penguatan ideologi dan konsolidasi internal partai, pemahaman terhadap tahapan dan aturan pemilu serentak, strategi pemenangan partai Gerindra, serta peluang dan tantangan partai Gerindra dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

Selain itu, dalam penelitian ini juga berhasil mengungkap hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan politik yaitu metode komunikasi yang kurang tepat pada saat menyampaikan materi, masih cenderung bersifat top down sehingga tidak muncul komunikasi dua arah secara maksimal. Hambatan selanjutnya lebih bersifat teknis, yaitu keterbatasan waktu akibat padatnya materi yang terkadang juga harus terpotong karena factor-faktor teknis seperti molornya waktu pembukaan acara, absensi sesuai dengan kartu identitas, pembagian alat peraga kampanye, serta antri pada saat istirahat, sholat dan makan.

Walaupun penelitian bukan penelitian pertama terkait Pendidikan politik kader partai, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dan kemenarikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian yaitu PDP PDI-P Jawa Barat yang sebelumnya belum pernah ada penelitian yang meneliti. Penelitian ini menggunakan subjek kader dan pengurus partai politik untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai perbedaan perspektif terkait pendidikan politik dan penelitian ini mampu memberikan hambatan serta solusi untuk perbaikan Pendidikan politik di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya DPD PDIP Provinsi Jawa Barat. Setelah penulis mengadakan studi pendahuluan melalui observasi lapangan yang dilakukan di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat yang

terletak di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.1, Lkr. Sel., Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, dengan ini peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul: **Dampak Pendidikan Politik Kader Partai terhadap Sikap Berpolitik** (Studi Kasus Pada DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat) karena PDIP memiliki pendidikan politik diperuntukkan bagi kader partai, baik itu kader lama maupun kader baru.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis utarakan, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada pendidikan politik yang di terapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kader partai, agar dapat menjadi jembatan aspirasi yang baik bagi masyarakat dan untuk menggali pemahaman dan pengalaman-pengalaman kader partai politik dalam hal pendidikan politik. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya?
2. Bagaimana kendala pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya?
3. Bagaimana dampak pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya?
4. Bagaimana solusi untuk optimalisasi pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai dampak pendidikan kader partai terhadap sikap berpolitik. Sementara itu tujuan khusus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya
2. Mengkaji dan menganalisis kendala penerapan pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya
3. Mengkaji dan menganalisis dampak pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya.
4. Mengkaji dan menganalisis solusi untuk optimalisasi pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah pengetahuan perpolitikan penulis dan orang yang membaca hasil penelitian ini, terutama pengetahuan mengenai pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis:

- a. Diketuinya bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya
- b. Diketuinya proses implementasi pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya

- c. Diketuainya kendala apa saja pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya
- d. Diketuainya hasil program pendidikan politik yang diselenggarakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat kepada kader politiknya.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas teori-teori yang memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yakni berupa teori yang mendukung dari proses penelitian yang diuraikan secara sistematis

BAB III Metodologi Penelitian

Berupa cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan pada saat pelaksanaan penelitian.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri A. Gambaran umum lokasi penelitian, B. Deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian

BAB V Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan dan saran- saran yang dapat peneliti rekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik dan fokus penelitian ini,

khususnya pemerintah terkait dan partai politik yang terkait yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.